

## **SIARAN PERS BPBD KAB. CILACAP**

15 September 2021

001/Pers-Pusdalops PB/BPBD/IX/39/2021

### **Kesiapsiagaan Menghadapi Bahaya Bencana Hidrometeorologi Melalui Peringatan Dini Berbasis Komponen Struktur dan Kultur**

**CILACAP** – Sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan pada September - Desember 2021. Sebesar 19,9% wilayah Indonesia diperkirakan telah masuk musim hujan hingga bulan September 2021. Pada bulan Oktober diperkirakan 59,1% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Pada bulan November diperkirakan 87,7% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan dan pada bulan Desember diperkirakan 96,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan pada tahun 2021.

Untuk wilayah kabupaten Cilacap berdasarkan prakiraan sifat hujan musim hujan 2021/2022 adalah atas normal sebanyak 88 ZOM ( 25,7% ), prakiraan perbandingan awal musim hujan 2021/2022 terhadap normalnya maju sebanyak 157 ZOM ( 45,9% ) memasuki musim hujan maju atau lebih awal dari normalnya maju 1-2 Dasarian dan prakiraan puncak musim hujan 2021/2022 bulan Januari dan Februari 2022.

Pemerintah Daerah dalam sistim peringatan dini bencana yaitu memberikan pengumuman resmi "Official Voice" dalam peringatan dini yang dapat dipahami, dipercaya, mampu mengajak tindakan respon yang tepat dan tidak membingungkan khalayak ramai, memastikan adanya infrastruktur peringatan dini nasional yang kredibel dalam memberikan informasi peringatan dini, dan berkerjasama dengan semua pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi kesiapsiagaan masyarakat.

**Menjelang dan menghadapi** puncak musim hujan, agar waktu yang masih tersedia dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan seluruh infrastruktur dan kondisi lingkungan dalam mitigasi bencana hidrometeorologi.

Menghadapi musim hujan tahun ini, kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat mencegah atau memitigasi dampak potensi bahaya hidrometeorologi melalui sistem peringatan dini, tentunya tidak terlepas dari dua komponen utama yaitu komponen struktur serta komponen kultur.

Komponen struktur merujuk pada infrastruktur pengamatan dan monitoring, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga teknis, seperti BMKG dan PVMBG. Sedangkan komponen kultur, sebagai diseminasi peringatan dini dan kapasitas masyarakat.

Untuk komponen struktur, yaitu institusi pemerintah seperti BMKG, PVMBG, Kementerian PUPR sudah memiliki sarana prasarana monitoring yang sudah cukup maju untuk bisa memberikan peringatan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat.

Namun, untuk komponen kultur terkait bagaimana warning bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat serta bagaimana masyarakat harus bertindak terhadap warning yang diberikan, masih menjadi pekerjaan rumah besar termasuk di dalamnya BPBD.

Pada konteks ini, bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops menjadi sangat penting.

Pemerintah Daerah untuk dapat menyampaikan informasi maupun melakukan koordinasi yang dibutuhkan untuk aksi dini atau early action di tingkat masyarakat.

Peringatan dini berbasis masyarakat, salah satunya menitikberatkan pada kemampuan merespons. Informasi sebagai suatu peringatan dini itu harus memenuhi parameter, antara lain informasi dipastikan sampai dan dipahami oleh masyarakat. Masyarakat merespons informasi dengan evakuasi ke tempat yang aman.

BPBD selalu menyampaikan surat edaran peringatan dini terkait potensi bahaya Hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, BPBD juga secara berkala menginformasikan analisis prediksi banjir melalui laman dan Whatsapp Group. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh kecamatan untuk kesiapsiagaan dan konsolidasi antar para perangkat desa maupun mitra di tingkat lokal.

Bupati memerintahkan kepada seluruh camat, lurah/kepala desa untuk memastikan tempat evakuasi sementara yang dapat digunakan, setiap daerah yang rawan bencana memiliki tempat evakuasi sementara dan papan rambu jalur evakuasi, evakuasi ke tempat pengungsian adalah pilihan, sosialisasikan

kepada masyarakat dengan bijak serta tertulis agar bagian dari birokrasi dan administrasi.

Kabupaten Cilacap yang secara geografis, geologis, demografi maupun hidrologis sangat rentan dan rawan bencana dimana hampir seluruh jenis bencana yang ada di Indonesia terdapat pula di Kabupaten Cilacap, sehingga kalau boleh mengambil istilah atau sebutan lain "Cilacap adalah supermarket atau Laboratoriumnya Bencana". Gambaran tersebut dapat terlihat pada data wilayah rawan bencana di Kabupaten Cilacap, dimana dari 269 Desa 15 Kelurahan pada 24 Kecamatan yang merupakan wilayah rawan bencana hampir mencapai 48,6%. Diantaranya adalah :

131 Desa 21 Kecamatan rawan banjir

94 Desa 12 Kecamatan rawan tanah longsor

73 Desa 19 Kecamatan rawan kekeringan

38 Desa 17 Kecamatan 10 Kecamatan rawan tsunami.

Drs. Wijonardi, MM

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap

#PakaiMaskerHargaMati

#TidakPakaiMaskerBisaMati

#SiapUntukSelamat

#KitaJagaAlamJagaKita

#BudayaSadarBencana

#BersatuLawanCovid19

#JagaJarakCucitangan